

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Analisis Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya mampu atau berdaya. pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkat harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi tersebut agar menjadi nyata.¹ Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.² Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.³

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *amkana*. Kata *tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau

¹ Zubaedi, Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik, (Jakarta : Kencana, 2013), Hal 24-25.

² Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 115

³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 03

tempat, baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat *ma'nawi* seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut disisi penguasa. Pengertian-pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi bisa diistilahkan dengan pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*).⁴

Berdasarkan konsep pemberdayaan peternak yang ada dalam Islam, bahwa menjaga dan memelihara hewan ternak merupakan kewajiban setiap umat muslim. Begitu pentingnya peternakan dimata islam karena sebagian besar para nabi adalah peternak. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia tidak mencintai dunia peternakan sebab di dalam al-Qur'an terdapat surat yang diberi nama dengan nama hewan/ternak. Contoh nama surat tersebut adalah Al-Baqarah (sapi betina) Al-An'am (binatang ternak), An-Nahl (lebah), An-Naml (semut), Al-Fill (Gajah), dan beberapa ayat al-Qur'an yang menyebutkan nama-nama hewan ternak. Melihat hal tersebut, patut bagi umat muslim untuk menjadi bahan renungan.

Hewan ternak adalah anugerah dari Allah untuk dimanfaatkan manusia, salah satunya dengan menjaga dan meningkatkan kualitasnya.

⁴ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm.75.

Tujuan meningkatkan keterampilan peternak adalah salah satunya untuk perbaikan ekonomi dan nilai pangan. Apabila hasil susu dari sapi perah berkualitas maka daya jualnya tinggi, begitu pula jika ditingkatkan keterampilan mengolahnya akan menjadi nilai tambah ekonomi. Seperti halnya ilmu dan keterampilan pembuatan fermentasi pakan yang akan memberikan manfaat dalam menghadapi kesulitan saat kemarau serta mengurangi biaya pembelian konsentrat. Penerapan ilmu dan keterampilan pembuatan permen susu yang dapat menjadi nilai tambah ekonomi bagi peternak. Selain itu, dengan penerapan ilmu pembuatan pupuk organik yang menjadikan peternak terampil dan menghindarkan lingkungan dari pencemaran lingkungan. Hal itu dapat menjadikan pelajaran bagi umat muslim bahwa menambah ilmu dan meningkatkan keterampilan itu perlu untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pada hewan ternak manusia diajarkan untuk berbagi mulai dari memberikan makanan dan waktu untuk merawat hewan ternak. Mengingat manfaat yang dihasilkan dari hewan ternak sangatlah bermacam, mulai dari pemanfaatan kandungan susu, daging, dan dapat digunakan sebagai kendaraan. Berikut ini adalah ayat yang mengandung berbagai manfaat yang ada pada hewan ternak.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۚ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢١

Artinya: “Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang

ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.” (QS. Al-Mukminun: 21).⁵

Pada penciptaan binatang ternak, terdapat pelajaran di samping adanya nikmat. Pelajaran yang didapat ialah bahwa darah yang mengalir dari makanan berubah di dalam kelenjar susu menjadi minuman yang baik, lezat, dan baik dimakan. Ini termasuk dalil paling menonjol atas kekuasaan Tuhan menciptakannya. Kemudian, Allah menguraikan tiga manfaat diantaranya adalah :

- 1) Memanfaatkan susunya untuk berbagai macam kepentingan seperti membuat mentega, keju dan sebagainya.
- 2) Seperti mengambil bulu dan rambutnya, menjadikannya untuk pakaian, permadani penghangat tubuh, rumah di gurun pasir dan sebagainya.
- 3) Memakan sebagian dari dagingnya setelah disembelih. Sebagaimana kalian memanfaatkannya ketika ia hidup, maka kalian pun memanfaatkannya untuk dimakan setelah disembelih.⁶

Ajaran umat muslim menganjurkan harus berkorban, dalam ayat diatas menjelaskan bahwa untuk bekorban berupa hewan sapi perah harus melihat dari kemampuan memelihara ternak tersebut. Menjaga hewan ternak, diperlukan keterampilan khusus dan perawatan yang baik mulai dari pemberian pakan, minum, vitamin, hingga memandikan hewan ternak. Pada tubuh sapi perah terdapat hasil yang diperoleh yakni susu yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan gizi manusia. Selain itu kandungan gizi air

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), Hlm. 932

⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Hlm. 23-24

memanfaatkan peluang, tersinergi, mampu bekerjasama, mengelola untuk mencari informasi serta mampu bertindak sesuai dengan situasi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dilalui agar masyarakat memperoleh kendali lebih besar akan urusan/masalah mereka dan meningkatkan inisiatif yang berhubungan dengan nasib mereka sendiri.

Pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan social yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan di masa yang akan datang.

Upaya tersebut perlu memperhatikan tiga hal penting yaitu:

1. Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar.

2. Aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah.
3. Keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik.⁹

a. Indikator Pemberdayaan masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.¹⁰

Ada empat hal yang menjadi indikator pemberdayaan yaitu :

- 1) Kegiatan yang terencana dan kolektif.
- 2) Kelompok lemah atau kurang beruntung menjadi prioritas.
- 3) Memperbaiki kehidupan masyarakat, dan
- 4) Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.¹¹

Selain keempat indikator tersebut dijelaskan juga beberapa indikator dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut :

⁹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal.12

¹⁰ *Ibid.*, Hlm.63

¹¹ Randy R wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *manajemen pemberdayaan sebuah pengantar dan panduan untuk pmeberdayaan masyarakat*, (jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007). Hlm.180

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau Wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk dternak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak,

mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

- 6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan ; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial ; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.¹²

b. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Sejatinya pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses. ketika mengevaluasi suatu proyek pengembangan masyarakat, siapapun harus melihat proses. Saat merencanakan suatu pengembangan masyarakat, siapapun harus mempertimbangkan proses secara mendalam sehingga pemberdayaan tersebut mendapatkan hasil yang sebagaimana mestinya.

¹² Edi suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat, cet ke-Enam*, (bandung: PT Refika Aditama, 2017), Hlm.64

Proses yang baik akan mendorong masyarakat untuk menentukan tujuan mereka sendiri sehingga tidak menimbulkan ketergantungan.¹³

Untuk menggunakan proses yang baik sering kali memerlukan banyak waktu, dengan kata lain proses yang baik tidaklah mudah untuk dilakukan. Aspek penting dalam sebuah proses ialah bahwa proses harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan ini tidak akan tercapai tanpa partisipasi penuh. proses pengembangan masyarakat tidak bisa dipaksakan dari luar. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi proses masyarakat yang dimiliki, dikuasai, dan dilangsungkan oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut Person yang dikutip oleh Suharto, Pemberdayaan merupakan sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan atas dan berpengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang harus mendapatkan ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan, yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹⁴

Dalam proses pemberdayaan, terdapat dua kecenderungan, yaitu :

1. *Pertama*, pemberdayaan menekankan pada proses atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan agar individu yang bersangkutan lebih berdaya.
2. *Kedua*, pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan

¹³ Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) Hlm. 365

¹⁴ Edi suharto, *membangun masyarakat memberdayakan...*, Hlm. 58

atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.¹⁵

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan dalam sebagian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: tahap pertama kesadaran, pada tahap kesadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian kesadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu membangun/diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan diri orang lain). Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan, atau memungkinkan untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas

¹⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora, 2001), Hlm. 43

kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga, pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Masyarakat dikatakan tidak berdaya apabila mereka tidak memiliki kuasa atas aset yang harus mereka kuasai, mereka miliki, mereka kelola, manfaatkan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pihak lain yang menguasai, mengelola, memiliki, dan memanfaatkan untuk kepentingan lain. Semakin hari kuasa mereka semakin hilang dan diambil oleh kelompok sosial lain, maka hal inilah yang dinamakan proses pelemahan atau proses ketidakberdayaan. Ditambah dengan arus modernisasi dan globalisasi yang semakin canggih sehingga membuat masyarakat semakin tidakberdaya di semua sektor kehidupan.¹⁶

Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggapan masyarakat mengenai ketidakberdayaan itu didasarkan dari diri mereka sendiri. Anggapan mereka mengenai dirinya sendiri sebagai seorang yang malas, lemah dan tidak berdaya. Disisi lain mereka tidak menyadari bahwa ketidakberdayaan juga akibat dari adanya ketidakadilan dalam lingkungannya dan diskriminasi dalam aspek tertentu.

¹⁶ Agus Afandi, dkk, *Dasar-Dasar Pengembara...*, Hlm. 162

Menciptakan kuasa atas milik, kelola, dan manfaat aset masyarakat, maka mereka perlu sebuah pemberdayaan. Kesimpulannya pemberdayaan adalah suatu proses menciptakan masyarakat untuk mampu dan memiliki kuasa atas miliknya, kelola atas miliknya, dan memanfaatkan miliknya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berarti pula pengelolaan terhadap tahapan-tahapan kerjanya secara berkelanjutan. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari:

1. Membangun hubungan dengan komunitas masyarakat dan menciptakan pemahaman atas *setting* program.
2. Mengidentifikasi *problem* yang memiliki potensi untuk dipecahkan.
3. Mengidentifikasi kelompok-kelompok dan *stakeholder* lain yang bersedia terlibat dalam proses program Merumuskan tujuan, program, dan kebutuhan.
4. Mengidentifikasi beberapa alat-alat untuk mencapai tujuan.
5. Persiapan dan uji coba beberapa kebutuhan material.
6. Memfasilitasi pihak partner.
7. Implementasi program yang sudah direncanakan.
8. Monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan.
9. *Sharing* rencana tindak lanjut untuk mengambil manfaat atas hasil program.¹⁷

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan...*, Hlm, 60

Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mengetahui berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Tujuan utama pemberdayaan peternak adalah kemandirian, dimana peternak mampu mengambil keputusan dengan pilihan terbaiknya sehingga mampu meraih peluang. Kemandirian adalah wirasawasta, yang berarti sifat-sifat keberanian, keutamaan dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri.

Konsep pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individual (*individual self-empowerment*), tetapi juga secara kolektif (*collective self empowerment*). Semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri (*self-actualization*) dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normatif, struktural, dan substansial. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif-efisien secara struktural, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat.¹⁸

c. Strategi Pemberdayaan

¹⁸ R. Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat...*, Hlm. 46

proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap Sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*Large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.¹⁹

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampitan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 66

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apa lagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselaran dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.²⁰

d. Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 67

dilepas untuk mandiri meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian, dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Telah disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembanguna.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.²¹

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/peiaiku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran

²¹ Sungkono Edi mulyono, *kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*, (yogyakarta: Ombak (anggota IKAPI), 2017), Hlm.44

konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat tumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian, masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan-keterampilan dapat berlangsung baik. Penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekadar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, namun belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini serlmg kali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat, maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Di samping itu, kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpujuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.²²

e. Sasaran Pemberdayaan

Suprijatna (2000) mengatakan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin tanpa harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun dengan demikian memberikan ”kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan“. Di samping itu, NGO merupakan agen yang mendapat

²² *Ibid.*, Hlm. 46

posisi penting, karena dipandang lebih bersifat entrepreneur, berpengalaman dan inovatif dibanding pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep good governance. Konsep ini menyetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat termasuk akademisi yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.²³

f. Pendekatan Pemberdayaan

Suharto (2005) mengatakan akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif. Kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang pertama memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan pada perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya/kekuatan di satu sisi, dan yang berhadapan dengan pihak yang lemah di sisi lainnya. Pendapat ini diwarnai oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapan tersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya, yaitu pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok lemah berakibat pada berkurangnya daya pada kelompok lain. Sudut pandang ini lebih populer dengan istilah zero-sum.

Jika diinterpretasikan pendekatan zero-sum tersebut, tampaknya lebih merupakan cerminan pemberdayaan model Barat. Pendekatan Ini lebih

²³ *Ibid...*, Hlm. 46

sesuai untuk menganalisis pemberdayaan dalam pengertian pengalihan kekuasaan. Dalam konteks pengalihan kekuasaan dari pihak yang sebelumnya memegang kekuasaan, kepada pihak yang tidak memiliki kekuasaan, akan berkurangnya kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pertama, karena sebagian telah beralih pada pihak kedua. Tetapi pendekatan zero-sum menjadi kurang relevan jika dipergunakan untuk menganalisis sebuah proses pemberdayaan, dalam konteks pemberian kemampuan dari pihak yang memiliki kemampuan. Tidak berarti kemampuan seseorang atau suatu lembaga akan berkurang, ketika memberikan atau lebih tepatnya mentransfer kemampuan mereka kepada pihak yang belum memiliki kemampuan.²⁴

Implikasi dari pendekatan zero-sum adalah orang/lembaga menjadi enggan untuk melakukan pemberdayaan terhadap orang atau lembaga lain. Logika ini dibenarkan mengingatkan proses pemberdayaan "yang dimaksud" pengalihan kekuasaan, maka akan berkurangnya kekuasaan mereka. Jika demikian maka penguasa tidak akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Pandangan kedua bertentangan dengan pandangan pertama. Jika pada pandangan pertama proses pemberdayaan mengakibatkan berkurangnya daya pada pihak yang berkuasa, sudut pandang kedua berpegang pada prinsip sebaliknya. Manakala terjadi proses pemberdayaan dari pihak yang berkuasa/berdaya kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat daya

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 47

pihak pertama, dengan demikian kekhawatiran yang terjadi pada sudut pandang pertama tidak berlaku pada sudut pandang kedua, pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah. Di samping itu, keyakinan yang dimiliki oleh sudut pandang ini adalah adanya penekanan aspek generatif. Sudut pandang demikian ini populer dengan nama *positive-sum*.

Dalam perjalanan historis pembangunan bangsa Indonesia tampaknya sudut pandang pertama cukup dominan. Jika diamati dari hasil-hasil pembangunan yang sesungguhnya memiliki tujuan pemberdayaan masyarakat miskin/lemah telah memunculkan fakta dikotomis. Fenomena hetergantungan daerah terhadap pusat, ketimpangan dan jurang pemisah antara kaya dan miskin, kesenjangan struktural, dominasi peran publik dan sosial antara laki-laki perempuan, merupakan pola-pola subordinasi yang memberikan bukti bahwa adanya pandangan bahwa pemberdayaan dalam konteks pembangunan nasional selama ini berakibat pada *zero-sum*, itulah mengapa selama ini juga terjadi tarik ulur antara pusat dan daerah, penguasa dan pihak yang dikuasai.

Seharusnya sudut pandang *positive-sum* yang dikembangkan ini dapat memfasilitasi terjadinya proses pemberdayaan yang hakiki, dengan adanya iktikad baik untuk mengubah keadaan, yang tidak berdaya menjadi berdaya. Iktikad baik tersebut dilakukan tanpa ada rasa setengah hati, karena ketakutan apabila sebagian kekuasaannya berkurang. Pengalihan daya tidak

melalui situasi konfliktual, akan tetapi bermodal suatu dorongan kesadaran akan kewajiban akan pentingnya aspek generatif yang perlu dilangsungkan. Kekuatan dan keberdayaan yang tumbuh dalam masyarakat akan memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah dan negara, bukan sebaliknya akan menumbangkan pemerintah dan negara. Keberdayaan masyarakat akan menjadi penyeimbang bagi pemerintah dan sektor swasta yang menjelma dalam bentuk kemitraan yang lebih bermakna.²⁵

g. Model-model Pengembangan Masyarakat

Jack Rothman dalam karya klasiknya yang terkenal, *Three Models of Community Organization Practice* (1968), mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pengembangan masyarakat lokal (*Iocality development*).
2. Perencanaan sosial (*social planning*), dan
3. Aksi sosial (*social action*).

Paradigma ini merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan satu sama lain. Setiap komponennya dapat digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Mengacu pada dua perspektif yang dikemukakan Mayo di

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 47-48

atas, model pertama dan kedua lebih sejalan dengan perspektif profesional, sedangkan model ketiga lebih dekat dengan perspektif radikal.²⁶

a) Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada tujuan proses” (*proses goal*) dari pada tujuan tugas atau tujuan hasil (*task or product goal*). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa *bottom-up* ini.²⁷

²⁶ Edi suharto, *membangun masyarakat memberdayakan...*, Hlm. 41

²⁷ *Ibid.*, Hlm.42

b) Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial di sini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi) dll. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada "tujuan tugas" (*task goal*). Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*) atau kelompok rawan sosial-ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna sosial. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai "konsumen" atau "penerima pelayanan" (*beneficiaries*). Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, dan pemecahan masalah bukan merupakan prioritas, karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga formal, semisal lembaga kesejahteraan sosial pemerintah (*Depsos*) atau swasta (LSM). Para perencana sosial dipandang sebagai ahli (*expert*) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat. serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.²⁸

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 44

c) Aksi Sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah Sistem klien yang seringkali menjadi 'korban' ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).²⁹

2. Usaha Ternak Sapi Perah

Peternakan sapi perah merupakan usaha peternakan yang menghasilkan produk susu sebagai komoditas utama. Susu merupakan salah satu sumber pangan yang mengandung gizi tinggi.³⁰ Khususnya sapi perah merupakan salah satu sumber daya penghasil protein berupa susu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya bagi kehidupan

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 45

³⁰ Sudi nurtini dan Mujtahidah Anggriani UM, *profil peternakan sapi Rakyat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), Hlm.5

masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan protein hewani menyebabkan kebutuhan susu sapi juga ikut meningkat, ini merupakan prospek yang sangat bagus bagi para pengusaha peternakan sapi perah.

Usaha peternakan sapi perah adalah suatu usaha dalam bidang peternakan yang dilakukan seseorang di tempat tertentu dimana perkembangbiakan ternak dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak tersebut. Usaha peternakan sapi perah masyarakat umumnya dikelola oleh petani ternak secara tradisional dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dari turun temurun. Oleh karena itu, kenaikan produksi peternakan masyarakat berjalan lambat. Meningkatkan hal tersebut maka diperlukan adanya perubahan teknologi baru dan diterapkan terus menerus.

Melakukan perubahan perilaku peternak dalam penerapannya meliputi tanggapan terhadap inovasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai dari pembawa pembaruan. Peternak mempunyai fungsi sebagai pemelihara ternak dan pengusaha, yang dapat membuat keputusan atau memilih suatu alternatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Keputusan untuk menerima atau menolak perubahan yang dibawa oleh agen pembaharu ditentukan oleh faktor sosial ekonomi.

Proses produksi, pendapatan dan konsumsi dalam rumah tangga peternak sapi perah merupakan satu unit kesatuan yang saling terkait, sehingga setiap terjadi perubahan dalam kebijakan yang mengatur aktivitas usaha ternak sapi akan berpengaruh terhadap produksi, pendapatan,

konsumsi dan penggunaan tenaga kerja. Rumah tangga peternak sapi perah harus bisa hidup dari hasil produksinya sehingga harus bekerja keras untuk memperoleh tambahan produksi yang diharapkan. Kenaikan pendapatan peternak sapi kerja sebagai akibat dari peningkatan produksi ternak sapi akan memperbaiki kesejahteraan peternak di wilayah pedesaan. Pendapatan ternak sapi yang semakin meningkat berdampak pada peningkatan standar kehidupan peternak di pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat melalui usaha ternak harus dilakukan dengan Pendampingan Intensif meliputi keterampilan beternak, kewirausahaan, mental-spiritual, dan kelembagaan. Untuk menilai efektivitas dari program pemberdayaan peternak memiliki indikator sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan peternak.
2. Peningkatan kepemilikan aset produktif.
3. Terbangunnya kemandirian dalam diri peternak.
4. Etos kerja dan spiritual.
5. Kemandirian Kelembagaan.³¹

Peternakan sapi perah di Indonesia didominasi oleh peternakan sapi perah rakyat. Peternakan sapi perah rakyat merupakan peternakan sapi perah yang diusahakan oleh peternak dengan skala kepemilikan kecil. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia terus-menerus mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Perkembangan ini salah satunya disebabkan

³¹ Sholihat dan Efri Syamsul Bahri, “Analisis Pola Pemberdayaan Peternak Miskin Di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa”, *Islamic Banking and Finance Journal*, Vol 1 No 1, 2016, hal. 11.

meningkatnya permintaan susu sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap gizi seimbang akan pangan sumber protein hewani. Peternakan sapi perah rakyat di Indonesia masih dikelola dengan manajemen tradisional dan skala pemilikan yang belum ekonomis, yaitu Sekitar 1-4 ekor, dengan produksi susu yang masih rendah, yaitu rata-rata 10 liter per hari per ekor. Kondisi skala usaha yang belum ekonomis ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya modal peternak dan kesulitan mencari Pakan hijauan. Terbatasnya lahan untuk tanaman pakan hijauan ternak menjadi Salah satu kendala dalam penyediaan jumlah dan kualitas pakan ternak. Hal ini yang menyebabkan usaha budi daya sapi perah belum efisien.

Usaha untuk mencapai tujuan pengembangan ternak sapi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan teknis dengan meningkatkan kelahiran ternak, menurunkan kematian, mengontrol hasil pemerahan susu ternak dan perbaikan genetik ternak.
- 2) Pendekatan terpadu yang merupakan teknologi produksi, manajemen ekonomi, pertimbangan sosial budaya yang tercakup dalam usaha peternakan serta pembentukan kelompok peternak yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.
- 3) Pendekatan agribisnis dengan tujuan mempercepat pengembangan peternakan melalui integarsi dari keempat aspek (lahan, pakan, plasma

nutfah dan sumberdaya manusia), proses produksi, pengolahan hasil dan pemasaran.³²

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aditia³³ dengan judul “*Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Boyolali*” hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat. Strategi yang ditempuh dalam pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat adalah meningkatkan skala usaha di tingkat peternak dengan memanfaatkan peran KUD, BRI dan pemerintah, meningkatkan kualitas susu segar, melakukan inseminasi buatan atau embrio transfer dari sapi perah FH. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti usaha ternak sapi perah dengan skala pedesaan (rakyat) sedangkan perbedaan penelitian ini adalah variabel yang di gunakan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha³⁴ dengan judul : “*Peranan Perusahaan Peternakan Sapi Perah dalam Upaya Pengembangan Masyarakat*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dilaksanakan PT. UPBS merupakan solusi dalam upaya pengembangan masyarakat dan memiliki manfaat, baik bagi PT.

³² Sudi Nurtini dan Mujtahidah Anggraini, *Profil Peternakan Sapi Perah...*, Hlm.2

³³ Ali Aditia, “Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Boyolali” *Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret*, Volume 7, Nomor 2, 2009, Hlm. 80-86

³⁴ Iyan Nugraha dkk, “Peranan Perusahaan Peternakan Sapi Perah dalam Upaya Pengembangan Masyarakat”, *Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran*, Volume 2, Nomor 1, 2016, Hlm. 13

UPBS maupun masyarakat secara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan masih banyak yang harus ditingkatkan serta diperbaiki. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dan obyek penelitian tentang sapi perah sedangkan perbedaan penelitian ini adalah variabel yang digunakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dkk³⁵ dengan judul “*Kontribusi Usaha Ternak Sapi Perah Terhadap Pendapatan Keluarga Peternak di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar skala usaha ternak sapi perah akan meningkatkan pendapatan peternak serta memiliki hubungan yang kuat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang usaha ternak sapi perah sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu variabel yang digunakan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Arif³⁶ dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan masyarakat khususnya peternak bebek di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi diantaranya dengan pemberian bantuan

³⁵ Purnomo dkk, “Kontribusi Usaha Ternak Sapi Perah Terhadap Pendapatan Keluarga Peternak di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali” *Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret*, Volume 13, Nomor 2, 2015. Hlm. 104

³⁶ Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa”, *Prodi Ilmu Administrasi Negara*, Volume 2, Nomor 1, 2014. Hlm. 175

ternak dan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi peternak bebek, juga sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam membina, mengarahkan dan mengendalikan termasuk didalamnya membuka peluang pasar terutama luar pasar daerah. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel pemberdayaan masyarakat sedangkan perbedaan dalam penelitian ini obyek penelitiannya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh muhammad³⁷ dengan judul *“Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ternak sapi “lembu aji” di dusun pondok kulon kecamatan berbah kabupaten sleman yogyakarta”* hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang usaha ternak sapi perah, kontribusi adanya usaha ternak sapi perah yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat peternak secara bertahap diukur dari jumlah sapi yang dimiliki. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel yang sama dan jenis penelitian yang digunakan sedangkan perbedaannya adalah studi kasus yang digunakan dalam penelitian.
6. Penelitian yang dilakukan oleh siswahyudianto dan dediduselo³⁸ dengan judul *“Strategi Pemberdayaan dan Inovasi Produk Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Miliki Desa di Kabupaten*

³⁷ M Wahyu Nugroho, “pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ternak sapi “lembu aji” di dusun pondok kulon kecamatan berbah kabupaten sleman yogyakarta”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Volume 4, Nomor 02, 2017, Hlm. 32

³⁸ siswahyudianto dan dedi suselo, “Strategi Pemberdayaan dan Inovasi Produk Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Miliki Desa di Kabupaten Tulungagung” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi syari’ah*, Volume 05, Nomor 2, 2019. Hlm. 19

Tulungagung” dengan hasil penelitian Strategi pemberdayaan BUMDes diwilayah Tulungagung telah memberikan kontribusi pendapatan asli desa (PADes) secara signifikan. hal ini tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti organisasi desa, kepercayaan, norma, dan jaringan dalam mendorong kemajuan desa mandiri lewat BUMdes. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu pemberdayaan masyarakat dan juga jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya adalah obyek pemberdayaan masyarakat.

7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustangin dkk³⁹ dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*” dengan hasil Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Wisata didesa Bumiaji ini telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan variabel pemberdayaan masyarakat sedangkan perbedaannya adalah obyek pemberdayaan.

³⁹ Mustangin dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Volume 2, Nomor 1, 2017. Hlm.72

8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad dkk⁴⁰ dengan judul “*Pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi didesa Desa Penglipura Bali)*” dengan hasil penelitian Pemberdayaan masyarakat Melalui pengembangan Desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa pengutan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan. Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan variabel pemberdayaan masyarakat sedangkan perbedaannya adalah obyek pemberdayaan.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ika dkk⁴¹ dengan judul “*Efektivitas Pendampingan kelompok dalam Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Peternak Sapi Perah*” dengan hasil penelitian terjadi perubahan mindset masyarakat tentang peluang wirausaha berbahan dasar produk sapi perah, peningkatan motivasi masyarakat setelah mendapat perlakuan berupa pendampingan kelompok. Persamaan dalam penelitian ini adalah obyek yang digunakan dalam penelitian yaitu tentang peternakan sapi perah sedangkan perbedaannya adalah variabel yang digunakan.

⁴⁰ Muhammad dkk, “Pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi didesa Desa Penglipura Bali)”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 23, Nomor 1, 2017, Hlm.16

⁴¹ Ika dkk, “Efektivitas Pendampingan kelompok dalam Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Peternak Sapi Perah”, *jurnal Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, 2018 Hlm. 24

10. Penelitian yang dilakukan oleh Atiek⁴² dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Oleh PT Nestle Indonesia Melalui Kelompok ternak Sapi Perah Budi Luhur*” dengan hasil Pemberdayaan yang dilakukan PT Nestle selama ini menghasilkan dampak yang positif khususnya bagi para peternak sapi perah dan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel dan obyek penelitian sama- sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat pada usaha ternak sapi perah perbedaanya adalah pelaku pemberdayaannya

⁴² Atiek Difa Mufidah dan Isbandi Rukminto Adi, “Pemberdayaan Masyarakat Oleh PT Nestle Indonesia Melalui Kelompok ternak Sapi Perah Budi Luhur”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 19, Nomor 2, 2018. Hlm. 25